

Korupsi Implikasi dan Saran Kebijakan



A M Zdavir Sapada
Pemeriksa Ahli Pertama BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

Korupsi seringkali menjadi pembahasan yang “bukan lagi” hanya menarik, namun juga menjadi momok menakutkan di negara-negara berkembang. Bahkan, hal ini telah menjadi perhatian ekonom kawakan Indonesia sendiri, di mana Prof. Soemitro (mantan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan) seringkali memberikan perhatian khusus yang belakangan sering kita kenal dengan pandangannya terkait kebocoran anggaran yang terjadi di kementerian. Kebocoran tersebut diyakini mencapai angka 30 hingga 40 persen dari total anggaran. Prof. Didin Damanhuri menjelaskan yang dimaksud dengan kebocoran anggaran adalah inefisiensi belanja anggaran yang dapat dilihat dari rendahnya kinerja rasio ICOR Indonesia.

ICOR atau *Incremental Capital Output Ratio* sendiri adalah rasio penambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output*, baik itu berupa barang dan jasa. Misal, jika Indonesia memiliki angka ICOR sebanyak 6, maka untuk menghasilkan 1 tambahan produk, dibutuhkan 6 unit modal tambahan. Semakin tinggi angka ICOR suatu negara, maka semakin tidak efisien kinerja investasi suatu negara. Sementara itu, kinerja investasi suatu negara sendiri turut dipengaruhi oleh kinerja birokrasi dan biaya administrasi suatu bisnis (juga selain dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur suatu negara). Maka, semakin rendah kinerja birokrasi dan semakin tinggi biaya administrasi yang diperlukan untuk membangun bisnis, maka semakin tinggi pula ICOR suatu negara. Jika hendak ditilik lebih jauh, tingginya ICOR suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut semakin tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat investasi.

Bahlil Lahadalia, selaku Menteri Investasi, sendiri menjelaskan ICOR Indonesia berada pada angka 6,6. Jika dibandingkan dengan angka ICOR Indonesia pada tahun 2016 yang mencapai 6,73, birokrasi Indonesia belum menunjukkan komitmen dalam melakukan reformasi yang berarti untuk memperbaiki kinerja dan menarik investasi ke Indonesia. Selain itu, angka ICOR yang dimiliki Indonesia lebih tinggi dibanding Malaysia yang mencapai angka 4,5, Filipina 3,7, Thailand, 4,4, dan Vietnam 4,6. Hal ini setidaknya menunjukkan tingginya angka investasi yang diperlukan di Indonesia, selain juga dapat menjelaskan tingginya biaya birokrasi dalam kepengurusan memulai suatu usaha. Karenanya, ia dapat menjadi penghambat sektor tertentu untuk maju dan berkembang. Sayangnya, tingginya biaya investasi di Indonesia yang mempengaruhi tingkat investasi bukan hanya dipengaruhi oleh biaya administrasi saja. Tingginya angka ICOR ini juga mengindikasikan hal mengkhawatirkan lainnya, yaitu tingginya angka korupsi yang bertindak sebagai *hidden tax* (juga dikenal sebagai pajak regresif atau *regressive tax*) bagi perekonomian.

Indeks Peringkat Korupsi Indonesia

Selaku organisasi pemerhati dan pegiat anti-korupsi, *The Transparency International* menempatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index* atau CPI) Indonesia dari 38 pada tahun 2018, menjadi 34 pada tahun 2022. Rendahnya nilai Indonesia pada indikator korupsi membuat peringkat Indonesia terlempar dari peringkat 89 pada tahun 2018 ke peringkat 110 pada tahun 2022 dari 180 negara. Indeks Persepsi Korupsi sendiri merupakan indikator atau alat ukur atas persepsi korupsi publik (khususnya akademisi dan para pebisnis) atas layanan yang diberikan oleh pemerintah, yang secara lebih mendalam menilai pelaksanaan penegakan hukum dan kebijakan pemerintahan. Semakin tinggi nilai CPI suatu negara, maka semakin rendah tingkat korupsi yang menggerogoti pemerintahan dan birokrasi suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai CPI suatu negara, semakin tinggi korupsi yang menggerogoti pemerintahan dan birokasinya.

Sementara, survei yang dilaksanakan oleh Gallup, Inc., selaku perusahaan konsultasi manajemen, juga mengindikasikan meningkat dan meluasnya tingkat korupsi di Indonesia yang ditunjukkan oleh meningkatnya persepsi masyarakat terhadap praktek korupsi di pemerintahan dari 84 persen pada tahun 2006, menjadi 91 persen pada tahun 2011. Menurunnya Upaya dalam memerangi korupsi mungkin juga dapat terwakilkan Indeks Tingkat Kepercayaan Public terhadap KPK yang dilakukan oleh Survei Indikator, yang pada tahun 2017 mencapai 81,9, namun merosot menjadi 73,5 pada tahun 2022. Merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK merupakan cerminan atas kinerja KPK yang kian menurun.

Terlepas dari perbedaan tahun hasil penelitian yang dilakukan, secara bersama-sama, baik data yang disajikan oleh TII, Gallup, maupun Survei Indikator, secara tidak langsung menegaskan bahwa, rendahnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dapat berhubungan

"Dalam pandangan ekonomi, juga dapat disebutkan bahwa perilaku koruptif yang melekat pada suatu perekonomian dapat mendorong tingkat inflasi. Hal ini terjadi karena korupsi meningkatkan biaya produksi barang dan jasa, dan karenanya mendorong tingkat inflasi yang terjadi melalui tingginya biaya suap dan administrasi tidak resmi yang berlebihan."

atas tingginya ICOR yang dimiliki di Indonesia. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi investor maupun calon investor dikarenakan tingginya angka korupsi membuat biaya administrasi pengurusan investasi menjadi lebih tinggi, walhasil, margin keuntungan yang berpotensi diraih investor menipis dan mengurangi insentif investor untuk menanam modal di Indonesia. Sehingga, tak salah jika korupsi melekat dengan sifat *hidden tax* bagi perekonomian, karena tingginya angka korupsi dapat mendongkrak biaya investasi, atau, dengan kata lain, mendorong inflasi pada barang dan jasa akibat tingginya tingkat korupsi yang terlibat dalam aktivitas produksi.

Korupsi terhadap Perekonomian Suatu Negara

Kian merebakluasnya korupsi bukan merupakan hal yang mudah untuk ditangani. Hal ini dikarenakan, walau upaya kolektif telah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat dalam memerangi korupsi, upaya ini dapat gagal melalui mekanisme dimana sejumlah kecil oknum meluluhkan upaya ini karena dianggap saling menguntungkan. Karenanya, tindakan ini pada akhirnya akan meluruhkan upaya anti korupsi dan membuat masyarakat tidak percaya pada sistem, dan pada akhirnya menggaet kelompok lain untuk turut terlibat demi keuntungan pribadi maupun kelompok (karena tindakan apapun terhadap upaya anti korupsi *toh* pada akhirnya akan gagal sebagai pembenaran).

Namun demikian, tindakan segelintir kelompok kecil ini sejatinya jelas merugikan seluruh kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan ia memperlebar jurang kesenjangan (karena hanya melibatkan dan menguntungkan kelompok pendapatan tertentu) dan karenanya menghambat kualitas kinerja ekonomi. Secara teoritik, aktivitas korupsi ini dapat disebut sebagai pemborosan sumber daya ekonomi karena pihak yang diuntungkan dalam kegiatan ini merupakan kelompok masyarakat yang telah mapan dalam ekonomi, sehingga penambahan kekayaannya tidak akan mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan *marginal propensity to consume* (MPC) masyarakat yang telah mapan memiliki angka yang rendah, sementara MPC masyarakat kurang mampu memiliki nilai yang tinggi, sehingga, korupsi bukan hanya tidak bermanfaat secara ekonomi, namun juga memperlebar jurang kesenjangan.

Dalam pandangan ekonomi, juga dapat disebutkan bahwa perilaku koruptif yang melekat pada suatu perekonomian dapat mendorong tingkat inflasi. Hal ini terjadi karena korupsi meningkatkan biaya produksi barang dan jasa, dan karenanya mendorong tingkat inflasi yang terjadi melalui tingginya biaya suap dan administrasi tidak resmi yang berlebihan. Hal ini ditegaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Özsahin dan Üçler (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi meningkatkan inflasi. Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) sendiri (2022), disebutkan bahwa dalam 2.110 kasus yang didalaminya yang menjangkau 133 negara, kasus korupsi telah mengakibatkan kerugian sebanyak \$3,6 miliar (di Indonesia sendiri, menurut laporan Indonesia Corruption Watch, korupsi berhasil mengakibatkan kerugian senilai Rp62,93 triliun pada 2021), nilai ini

setara dengan 5 persen pendapatan yang hilang. Sehingga, tidak heran tingginya angka korupsi pada suatu negara dan pemerintahan dapat dikatakan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Karenanya, bahkan, tindakan aktivitas korupsi yang dibiarkan tidak terkendali dapat meningkatkan ketidakpuasan dan keresahan sosial, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan negara baik secara ekonomi maupun politik. Namun demikian, hal ini dapat dibalikkan melalui kebijakan yang efektif yang ditujukan untuk pengendalian korupsi yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat inflasi dan menstabilkan tingkat harga.

Bagaimana Memerangi Korupsi dan Kesenjangan Secara Bersama-sama?

Nyatanya, korupsi tidak hanya meningkatkan inflasi, namun juga kesenjangan—sebagaimana yang diutarakan sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Gupta et.al (1998) yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan korupsi mengurangi pertumbuhan pendapatan masyarakat miskin hingga 7,8 persen per tahun. Bahkan, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa, walaupun suatu negara meningkatkan realisasi belanja pada anggaran sosial, ia tidak secara serta-merta mengurangi kesenjangan pendapatan. Sehingga, jelas, diperlukan perencanaan dan upaya ekstra dan matang dalam memerangi korupsi dan kesenjangan yang diakibatkannya.

Sejatinya, memerangi kesenjangan sejatinya selalu bisa dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi berbasis target yang relatif mudah dilakukan. Melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi atau disebut juga *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang diperkenalkan oleh *Oxford Poverty & Human Development Initiative* (OPHI) bersama *United Nations Development Programme* (UNDP), kemiskinan dan kesenjangan dapat diatasi melalui pemenuhan 3 kebutuhan mendasar yang sebagian besar masyarakat miskin terdeprivasi (mengalami kekurangan), yang mencakup: kesehatan, pendidikan, serta indikator standar hidup (untuk menghitung peristiwa dan keparahan kemiskinan). Dengan menargetkan pada pemenuhan 3 indikator tersebut (melalui subsidi atau bantuan), maka diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sehingga pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dapat digunakan untuk meningkatkan taraf ekonominya (misal digunakan untuk modal usaha).

"Walaupun suatu negara meningkatkan realisasi belanja pada anggaran sosial, ia tidak secara serta-merta mengurangi kesenjangan pendapatan. Sehingga, jelas, diperlukan perencanaan dan upaya ekstra dan matang dalam memerangi korupsi dan kesenjangan yang diakibatkannya."

Namun demikian, jika memerangi kesenjangan dapat dilakukan dengan mudah, maka tidak demikian dengan korupsi. Hal ini mengingat korupsi kian melibatkan banyak pihak dan (dianggap) menguntungkan kelompok (namun merugikan sebagian besar masyarakat). Hal ini dapat dilihat dari catatan ACFE yang menyebutkan bahwa kasus korupsi dan *fraud* dari tahun ke tahun kian melibatkan banyak orang: jika pada tahun 2012 kasus korupsi/*fraud* yang dilakukan oleh 1 orang terdapat pada 58 persen kasus, pada tahun 2022 kasus korupsi/*fraud* dengan pelaku 1 orang menurun menjadi 42 persen (yang mengakibatkan kerugian sebesar \$57.000), sementara kasus korupsi/*fraud* yang melibatkan 2 orang atau lebih pada tahun 2022 meningkat menjadi 58 persen (mengakibatkan kerugian \$182.000), dibanding hanya 42 persen pada 2012.

Lebih jauh, walau dalam laporannya ACFE tidak menjelaskan cara memerangi korupsi secara gamblang, ACFE menawarkan sejumlah metode untuk mencegah korupsi, di antaranya melalui kuisisioner yang memandu Langkah yang perlu dijalankan untuk mengevaluasi langkah pencegahan korupsi/*fraud* yang telah/ untuk dilaksanakan agar tidak terjadi. Selain itu, ACFE juga menawarkan akan pentingnya pemetaan profil pelaku *fraud*, sektor yang paling banyak mengalami *fraud*, serta *tools* dalam mendeteksi *fraud*: pemetaan profil ciri pelaku menjadi penting agar organisasi/perusahaan dapat mewaspadaai, melakukan pendeteksian lebih dini untuk mencegah pelaku korupsi; memetakan dan mengenali sektor yang paling banyak mengalami korupsi dapat menjadi bekal bagi lembaga/badan audit pemerintahan maupun swasta untuk mengalokasikan sumber daya terbatas yang dimiliki untuk berfokus pada sektor tersebut; *tools* mendeteksi korupsi menjadi penting agar dapat digunakan oleh berbagai organisasi/perusahaan untuk mendeteksi korupsi secara lebih dini dan meminimalisir kerugian. Dalam hal ini, ACFE menunjukkan akan pentingnya peranan layanan pelaporan berbasis telepon maupun surel untuk melaporkan kasus korupsi. Karenanya, hal ini dapat menjadi sinyal untuk para organisasi/perusahaan untuk menyediakan maupun memperkuat layanan deteksi *fraud* tersebut.

Terakhir, segala upaya ini tidak akan berarti tanpa adanya komitmen politik para pejabat publik, khususnya para pemimpin negara (Presiden dan jajaran Menteri). Hal ini menjadi penting mengingat para pemimpin negara akan menjadi contoh terdepan bagi pejabat lainnya. Komitmen ini juga menjadi penting untuk menarik perhatian publik agar turut berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan perilaku korupsi/*fraud* yang berlangsung, sehingga, diharapkan mampu membentuk budaya kritis dan menciptakan perilaku bersih-bebas korupsi pejabat publik, dan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.